PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBERLANJUTAN USAHATANI PADI SAWAH

Suharyon[1)], Yanti Rina Darsani[1)], Valeriana Darwis[1)], Yanter Hutapea[2)], Mufidah[3)]

[1]Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, BRIN
[2]Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas BRIN
[3]Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari, Jambi

E-mail: suharyonhariyon@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze local government performance in supporting lowland rice farming based on farmers' perceptions, assess the sustainability level of lowland rice farming systems from economic, social, and environmental dimensions, and examine the effect of local government performance on farming sustainability in Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province. The study employed a mixed-methods approach with quantitative dominance. Primary data were collected through a survey of 60 rice farmers selected purposively. Data analysis involved the construction of a Local Government Performance Index (LGPI) and a Farming Sustainability Index (FSI), followed by multiple linear regression analysis controlling for farmers' education, farm size, and farming experience. The results show that local government performance is perceived to be moderate to high, particularly in public services and input facilitation, while extension and farmer assistance remain relatively weak. The sustainability of lowland rice farming is classified as moderately sustainable, with the economic dimension performing better than the social and environmental dimensions. Regression results indicate that local government performance has a positive and statistically significant effect on farming sustainability. These findings highlight the importance of strengthening local government performance to enhance sustainable lowland rice farming.

Keywords: *local government performance; farming sustainability; lowland rice farming; farmers' perceptions; agricultural policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja pemerintah daerah berdasarkan persepsi petani, menilai keberlanjutan usahatani padi sawah dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menguji pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap keberlanjutan usahatani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan metode campuran dengan dominasi kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui survei terhadap 60 petani padi yang dipilih secara purposif. Analisis dilakukan dengan menyusun Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD) dan Indeks Keberlanjutan Usahatani (IKU), kemudian menggunakan regresi linear berganda dengan mengontrol pendidikan, luas lahan, dan pengalaman berusahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berada pada kategori sedang hingga tinggi, terutama pada pelayanan publik dan fasilitasi sarana produksi, sedangkan penyuluhan dan pendampingan relatif lemah. Keberlanjutan usahatani tergolong cukup berkelanjutan, dengan dimensi ekonomi lebih baik dibandingkan dimensi sosial dan lingkungan. Hasil regresi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usahatani. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan usahatani padi sawah.

Kata Kunci: *kinerja pemerintah daerah; keberlanjutan usahatani; padi sawah; persepsi petani; kebijakan pertanian*

PENDAHULUAN

Keberlanjutan usahatani padi menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi petani. Karena itu, pengembangan usahatani padi tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi dalam jangka pendek, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan dan kesejahteraan petani (Pretty, 2008). Keberlanjutan usahatani padi masih menghadapi berbagai ancaman. Dari sisi ekonomi, petani menghadapi harga jual yang tidak stabil, kenaikan harga input, serta keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan formal (Rachman et al., 2022; Widyawati, 2025). Dari sisi sosial, minat generasi muda terhadap sektor pertanian cenderung menurun (Utami, 2021). Sementara itu, dari sisi lingkungan, penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan dapat berkontribusi terhadap degradasi kesuburan tanah dan penurunan kualitas air (Altieri & Nicholls, 2017; FAO, 2020). Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan usahatani tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani dalam mengelola usahanya, tetapi juga oleh lingkungan kebijakan dan dukungan kelembagaan yang tersedia.

Kondisi tersebut juga menjadi persoalan dalam pengembangan usahatani padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan petani mempertahankan dan mengembangkan usahataninya (Frimawaty et al., 2013). Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur, program bantuan, layanan penyuluhan, serta penguatan kelembagaan petani. Namun, keberadaan kebijakan belum dengan sendirinya menjamin manfaat yang dirasakan petani. Efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelayanan, fasilitasi dan pendampingan dalam pelaksanaannya (Osborne & Gaebler, 1992). Di sisi lain, penyelenggaraan program juga perlu memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya pemerintah agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan (Afonso et al., 2010).

Persoalan yang sering muncul adalah adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan pelaksanaannya di tingkat lapangan. Kondisi tersebut dapat mengurangi dampak program pembangunan pertanian terhadap petani (World Bank,

2019). Rachman et al. (2022) juga menunjukkan bahwa di beberapa daerah tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaannya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dukungan pemerintah terhadap pembangunan pertanian antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana produksi, pembangunan dan rehabilitasi irigasi, layanan penyuluhan, serta pembinaan kelompok tani. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran program, kualitas layanan penyuluhan, kesinambungan pendampingan dan efektivitas kebijakan dalam mendorong praktik usahatani yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi dasar penelitian untuk melihat kinerja pemerintah daerah dari perspektif petani dan mengaitkannya dengan keberlanjutan usahatani padi sawah. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mendukung usahatani padi sawah berdasarkan persepsi petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; (ii) menganalisis tingkat keberlanjutan usahatani padi sawah dari dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan; dan (iii) menganalisis pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap keberlanjutan usahatani padi sawah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah sebagai salah satu sentra produksi padi sawah dengan agroekosistem pasang surut dan pesisir. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner terhadap 60 petani padi sawah penerima program pemerintah serta FGD dengan 5 aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data sekunder diperoleh dari BPS dan Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Analisis dilakukan dengan menyusun Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD) dan Indeks Keberlanjutan Usahatani (IKU). IKPD digunakan untuk menggambarkan kinerja pemerintah daerah, sedangkan IKU mengukur keberlanjutan usahatani dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Setiap indikator dinormalisasi pada skala 0–1 dan selanjutnya diagregasikan menjadi indeks komposit. Pengaruh kinerja pemerintah daerah terhadap keberlanjutan usahatani dianalisis menggunakan regresi linear berganda, dengan persamaan

$$IKU_i = \beta_0 + \beta_1 IKPD_i + \beta_2 EDU_i + \beta_3 LAND_i + \beta_4 EXP_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

IKU_i = Indeks Keberlanjutan Usahatani petani ke-i
$IKPD_i$ = Indeks Kinerja Pemerintah Daerah petani ke-i
EDU_i = tingkat pendidikan petani (tahun)
$LAND_i$ = luas lahan usahatani (ha)
EXP_i = pengalaman berusahatani (tahun)
β_0 = konstanta
β_1, β_2, β_3, β_4 = koefisien regresi
ε_i = galat (error term)

Estimasi parameter dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Signifikansi parameter diuji menggunakan uji t, sedangkan kelayakan model dievaluasi melalui nilai koefisien determinasi (R^2). Penggunaan regresi OLS dalam konteks ini sesuai dengan rekomendasi Hair et al. (2014) dan Wooldridge (2016) untuk analisis hubungan kausal antarvariabel dengan data cross-section.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani dan Profil Usahatani Padi Sawah

Petani responden rata-rata berusia 47,8 tahun dengan pengalaman berusahatani sekitar 19,6 tahun (Tabel 1). Tingkat pendidikan formal rata-rata 8,4 tahun yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki pendidikan yang relatif terbatas, meskipun pengalaman yang dimiliki cukup panjang.

Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kemampuan petani dalam mengelola usahatani dan merespons berbagai dukungan maupun program pemerintah.

Tabel 1
Karakteristik Petani Responden di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Karakteristik	Rata-rata	Minimum–Maksimum
Umur petani (tahun)	47,8	29 – 68
Pendidikan formal (tahun)	8,4	6 – 16
Pengalaman berusahatani (tahun)	19,6	5 – 40
Jumlah tanggungan keluarga (orang)	4,1	2 – 7

Dari sisi usahatani, rata-rata luas lahan yang dikelola hanya 0,83 ha (Tabel 2), sehingga usaha padi sawah di lokasi penelitian masih didominasi oleh skala usaha yang relatif kecil. Dengan luas tersebut, rata-rata produksi mencapai 4.950 kg GKP/ha/musim, dengan penerimaan sekitar Rp24,75 juta dan pendapatan Rp11,55 juta/ha/musim. Kondisi ini menunjukkan bahwa usahatani padi sawah tetap memberikan kontribusi ekonomi bagi petani, meskipun skala pengusahaannya relatif terbatas.

Tabel 2
Profil Usahatani Padi Sawah Responden

Variabel	**Rata-rata**
Luas lahan garapan (ha)	0,83
Produksi padi (kg GKP/ha/musim)	4.950
Biaya produksi (Rp/ha/musim)	13.200.000
Penerimaan (Rp/ha/musim)	24.750.000
Pendapatan (Rp/ha/musim)	11.550.000

Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Usahatani Padi Sawah

Hasil penilaian petani menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mendukung usahatani padi sawah tergolong sedang hingga tinggi, dengan nilai IKPD sebesar 0,65 (Tabel 3). Pelayanan publik pertanian memperoleh penilaian paling tinggi (0,72), disusul fasilitasi sarana produksi (0,69). Penilaian terhadap dukungan kebijakan dan penyediaan infrastruktur berada pada kategori sedang, masing-masing sebesar 0,65 dan 0,63. Berbeda dengan aspek tersebut, penyuluhan dan pendampingan memperoleh nilai paling rendah, yaitu 0,58. Gambaran ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah relatif lebih mudah dirasakan petani dalam bentuk pelayanan dan fasilitasi, sementara pendampingan yang berkaitan langsung dengan proses usahatani masih belum optimal. Kondisi tersebut penting diperhatikan karena penyuluhan tidak hanya berfungsi menyampaikan program, tetapi juga membantu petani menerapkan pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan usahataninya.

Tabel 3
Nilai Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD)

Dimensi Kinerja	Nilai Indeks	Kategori
Pelayanan publik pertanian	0,72	Tinggi
Fasilitasi sarana produksi	0,69	Sedang–Tinggi
Dukungan kebijakan	0,65	Sedang
Penyediaan infrastruktur	0,63	Sedang
Penyuluhan & pendampingan	0,58	Sedang
IKPD total	0,65	Sedang–Tinggi

Tingkat Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah

Secara keseluruhan, nilai IKU sebesar 0,62 menunjukkan bahwa usahatani padi sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada kondisi cukup berkelanjutan (Tabel 4). Dari tiga dimensi yang dinilai, aspek ekonomi memiliki nilai paling baik, yaitu 0,68. Artinya, kegiatan usahatani masih memberikan manfaat ekonomi yang cukup bagi petani. Kondisi sosial juga tergolong cukup berkelanjutan dengan nilai 0,62. Nilai yang lebih rendah terlihat pada dimensi lingkungan, yaitu 0,56. Rendahnya nilai ini terutama berkaitan dengan penggunaan pupuk dan pestisida kimia serta praktik konservasi tanah dan air yang belum banyak diterapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan keberlanjutan usahatani ke depan perlu lebih memberi perhatian pada aspek lingkungan, tanpa mengabaikan kemampuan usahatani dalam mempertahankan pendapatan petani.

Tabel 4
Nilai Indeks Keberlanjutan Usahatani (IKU)

Dimensi Keberlanjutan	Nilai Indeks	Kategori
Ekonomi	0,68	Cukup berkelanjutan
Sosial	0,62	Cukup berkelanjutan
Lingkungan	0,56	Kurang–cukup berkelanjutan
IKU total	0,62	Cukup berkelanjutan

Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Keberlanjutan Usahatani

Hasil estimasi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usahatani padi sawah pada taraf 1 persen, dengan koefisien sebesar 0,4831. Pendidikan petani juga berpengaruh positif pada taraf 5 persen, sedangkan luas lahan berpengaruh pada taraf 10 persen. Pengalaman

berusahatani tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Nilai R^2 sebesar 0,56 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 56 persen variasi keberlanjutan usahatani (Tabel 5).

Tabel 5
Hasil Estimasi Regresi Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah

Variabel Independen	**Koefisien**	**t-statistik**	**Sig.**
Konstanta	0,2140**	2,0124	0,0482
Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD)	0,4831***	4,7568	<0,001
Pendidikan Petani (tahun)	0,0213**	2,1765	0,0331
Luas Lahan (ha)	0,0668*	1,9397	0,0574
Pengalaman Usahatani (tahun)	0,0091	1,6238	0,1102
R^2	0,5600		
Adjusted R^2	0,5320		

Keterangan: *** signifikan pada α = 1%; ** signifikan pada α = 5%; * signifikan pada α = 10%.

Besarnya pengaruh IKPD menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah cukup menentukan kondisi keberlanjutan usahatani di lokasi penelitian. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan sarana produksi, tetapi juga pelayanan, kebijakan, infrastruktur, serta penyuluhan dan pendampingan. Peran kelembagaan dan kebijakan seperti ini telah lama dipandang sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertanian yang berkelanjutan (Pretty, 2008). Hubungan antara kualitas sektor publik dan kinerja kegiatan ekonomi juga terlihat dalam kajian Afonso et al. (2010), sedangkan Abdulai et al. (2018) menunjukkan bahwa dukungan institusional dapat membantu memperkuat keberlanjutan usahatani skala kecil.

Pendidikan petani yang berpengaruh positif memberi gambaran bahwa kemampuan memahami informasi dan merespons perubahan ikut menentukan keberlanjutan usahatani. Hal ini sejalan dengan FAO (2014) yang menempatkan kapasitas manusia sebagai salah satu unsur penting dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan. Luas lahan juga menunjukkan pengaruh, meskipun relatif lemah. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan peluang petani dalam mengelola risiko dan memperoleh manfaat ekonomi dari skala usaha yang lebih besar, sebagaimana ditemukan Rachman et al. (2022). Sementara itu, pengalaman yang tidak berpengaruh menunjukkan bahwa lamanya berusahatani belum tentu menghasilkan praktik yang lebih berkelanjutan. Pengetahuan yang

diperoleh dari pengalaman tetap perlu diperbarui melalui pembelajaran, informasi, dan inovasi (Pretty, 2008).

Hasil tersebut mengarah pada satu hal penting, yaitu keberlanjutan usahatani tidak cukup dijelaskan oleh karakteristik petani. Lingkungan kelembagaan tempat petani menjalankan usahanya juga mempunyai peran yang nyata. Kajian Hussain et al. (2020) memperlihatkan pentingnya kebijakan dan layanan pertanian dalam menjaga stabilitas usahatani, sementara FAO (2021) menekankan perlunya kapasitas institusi publik yang mampu menjangkau petani secara konsisten. Dalam penelitian ini, kebutuhan tersebut terutama terlihat pada aspek penyuluhan dan pendampingan yang memperoleh nilai IKPD paling rendah. Karena itu, perbaikan kualitas pendampingan menjadi salah satu langkah yang relevan untuk memperkuat keberlanjutan usahatani padi sawah.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mendukung usahatani padi sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada kategori sedang hingga tinggi, dengan nilai IKPD sebesar 0,65. Pelayanan publik dan fasilitasi sarana produksi telah dirasakan cukup baik oleh petani, sedangkan penyuluhan dan pendampingan masih perlu ditingkatkan. Pada saat yang sama, keberlanjutan usahatani padi sawah berada pada kategori cukup berkelanjutan dengan nilai IKU sebesar 0,62. Kondisi ekonomi dan sosial relatif lebih baik, sementara dimensi lingkungan masih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian lebih besar.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan usahatani, dengan koefisien sebesar 0,4831 pada taraf signifikansi 1 persen, setelah mempertimbangkan karakteristik petani seperti pendidikan, luas lahan dan pengalaman berusahatani. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usahatani tidak hanya bergantung pada kemampuan dan karakteristik petani, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menyediakan pelayanan, fasilitasi, penyuluhan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendorong keberlanjutan usahatani padi sawah, khususnya pada aspek lingkungan yang masih relatif lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulai, A., Tietje, H., & Wollni, M. (2018). Agricultural technology adoption and farm efficiency: Evidence from smallholder farmers in Sub-Saharan Africa. *Agricultural Economics, 49*(2), 1–14. https://doi.org/10.1111/agec.12410

Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi, V. (2010). Public sector efficiency: Evidence for new EU member states and emerging markets. *Applied Economics, 42*(17), 2147–2164. https://doi.org/10.1080/00036840701765460

Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2017). The adaptation and mitigation potential of traditional agriculture in a changing climate. *Journal of Peasant Studies, 44*(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1237251

Altieri, M. A., & Nicholls, C. I. (2017). The agroecological revolution. *Journal of Peasant Studies*.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2014). *Sustainability assessment of food and agriculture systems (SAFA): Guidelines*. FAO. https://www.fao.org/sustainability/safa

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). *Sustainability pathways for agricultural systems*. FAO. https://www.fao.org/publications

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2021). *Building resilient and sustainable rice-based farming systems*. FAO Regional Office for Asia and the Pacific.

Frimawaty, E., Basukriadi, A., Syamsu, J. A., & Suryadi, A. (2013). Sustainability of rice farming based on eco-farming to face food security and climate change in Indonesia. *Journal of Natural Resources and Environmental Management, 3*(1), 1–10.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate data analysis (7th ed.)*. Pearson Education Limited.

Hussain, I., Ping, Q., & Ahmad, M. (2020). Irrigation access, agricultural productivity, and farm income: Evidence from South Asia. *Water Economics and Policy, 6*(2), 1950015. https://doi.org/10.1142/S2382624X19500159

Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques (2nd ed.)*. New Age International Publishers.

Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. *Family Practice, 13*(6), 522–526. https://doi.org/10.1093/fampra/13.6.522

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 42*(5), 533–544. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y

Pretty, J. (2008). Agricultural sustainability: Concepts, principles and evidence. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363*(1491), 447–465. https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2163

Rachman, B., Ariani, M., Septanti, K. S., & Adawiyah, C. R. (2022). Sustainability status, sensitive and key factors for increasing rice production in Indonesia. *PLOS ONE, 17*(12), e0274689. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274689

Reswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.)*. SAGE Publications.

Saleh, K., et al. (2021). Factors affecting farmers' capacity in managing rice farming. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.

Utami, A. D. (2021). Farmers' subsistence and sustainability in Indonesian rice farming. *Jurnal Agro Ekonomi, 39*(2), 85–102.

World Bank. (2019). *Enhancing public sector performance for agricultural development*. World Bank Group. https://www.worldbank.org

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.